



BULETIN

# PARLEMENTARIA

NOMOR: 765/IV/2013

I/APRIL 2013



## 128<sup>TH</sup> ASSEMBLY

### OF THE INTERPARLIAMENTARY UNION (IPU) AND RELATED MEETINGS

#### QUITO-EQUADOR 2013



## Rencana Induk Global Pasca 2015 Harus Dibuat Komprehensif

# KEGIATAN DPR-RI AWAL APRIL 2013

Kegiatan AKD DPR-RI pada awal April 2013 ini diawali dengan Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan III tahun sidang 2012-2013. Rapat paripurna ini menandai berbagai kegiatan DPR-RI lainnya, khususnya di bidang pengawasan dan *fit and proper test* pejabat negara. Kegiatan diplomasi parlemen juga dilaporkan pada minggu ini. Berikut adalah beberapa poin penting kegiatan DPR awal April 2013.

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alie

## Rapat Paripurna 2 April

Sebelum dimulai Rapat Paripurna, Ketua Rapat melaporkan adanya empat surat masuk, yaitu dari DPD-RI tanggal 28 Februari perihal Penyampaian Keputusan DPD, surat dari Pimpinan Baleg tanggal 27 Maret perihal Penjadwalan RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, dua surat dari Presiden RI tanggal 18 Maret Perihal Permohonan Pertimbangan Pencalonan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Nigeria untuk Republik Indonesia dan tertanggal 30 Maret Perihal Calon Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI). Surat tersebut diproses melalui mekanisme dewan.

Rapat Paripurna tanggal 2 April 2013 **mengagendakan [1]** penyampaian Ikhtisar hasil Pemeriksaan BPK-RI semester II tahun 2012 dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan. Agenda acara ini disampaikan oleh ketua BPK-RI, yang intinya bahwa semester II tahun 2012, BPK-RI telah memeriksa 709 objek pemeriksaan yang terdiri atas 154 objek pemeriksaan kinerja, 450 objek PDTT, dan 105 objek pemeriksaan keuangan. Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan sebanyak 12.947 kasus senilai Rp. 9,72 triliun. Dari jumlah tersebut sebanyak 3.990 kasus senilai Rp. 5,83 triliun merupakan temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangpenerimaan. Rekomendasi BPK terhadap kasus-kasus tersebut antara lain adalah penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan. Adapun sebanyak 4.815 kasus



merupakan kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), sebanyak 1.901 kasus penyimpangan administrasi dan sebanyak 2.241 kasus senilai Rp. 3,88 triliun merupakan temuan ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidak efektifan. Rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah perbaikan SPI dan/atau tindakan administratif dan/atau korektif lainnya. Terhadap kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangpenerimaan dengan nilai sebesar Rp. 5,83 triliun tersebut, dan kasus ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan dengan nilai Rp. 3,88 triliun perlu mendapat perhatian Pimpinan dan para Anggota DPR-RI untuk mengawasi dan mendorong penyelesaian tindak lanjutnya.

**Acara [2]** Laporan Komisi XI mengenai hasil pembahasan Calon Gubernur BI dilanjutkan pengambilan keputusan. Disampaikan oleh Ketua Komisi XI, bahwa Agus Martowardojo telah mendapatkan persetujuan Komisi berdasarkan suara terbanyak, yaitu 45 setuju, 7 tidak setuju dan 1 abstain.

Persetujuan tersebut diberi catatan yang dimintakan atensi kepada gubernur BI terpilih, antara lain [1] BI harus fokus dalam pengendalian target inflasi melalui penguatan fungsi TPI dan TPID, serta menjaga kestabilan nilai tukar.

[2] Gubernur BI terpilih harus menjaga kekompakan dan keharmonisan kerja di lingkungan BI, agar terjalin hubungan kerjasama yang baik dan keputusan Dewan Gubernur bersifat kolektif kolegial. [3] Dalam rangka mendorong



perkembangan perbankan syariah di Indonesia dan men-sejajarkan perbankan syariah dengan negara lain, BI harus terus mendorong akselerasi pertumbuhan perbankan syariah mengingat besarnya potensi pasar perbankan syariah di Indonesia. [4] Kebijakan makro prudensial yang dijalankan oleh BI harus berpihak kepada kepentingan petani, nelayan, UMKM, sektor riil dan kepentingan ekonomi nasional.

Pada agenda ini, Rapat Paripurna menyetujui Agus Martowardojo ditetapkan sebagai Calon Gubernur Bank Indonesia periode 2013-2018 menggantikan Dr. Darmin Nasution.

**Agenda [3]** laporan Komisi III mengenai hasil pembahasan Calon Hakim Konstitusi dilanjutkan pengambilan keputusan. Disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III, bahwa Komisi III telah menggelar rapat menanyakan kesediaan Dr. HM Akil Mochtar SH. MH. untuk dicalonkan kembali menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi periode 2013-2018. Komisi III melalui rapat pleno internal mengambil keputusan bahwa Dr. HM. Akil Mochtar dipilih kembali menjadi Hakim MK untuk masa jabatan berikutnya. Komisi III mengharapkan bawa masa jabatan periode kedua ini, Dr. HM Akil Mochtar SH MH, akan mampu menjaga, meningkatkan citra dan wibawa MK sebagai lembaga pengawal konstitusi.

Atas keputusan ini, rapat Paripurna Dewan memberikan persetujuan untuk menetapkan kembali Dr. HM Akil Mochtar untuk menduduki jabatan anggota Hakim MK periode 2013-2018.

**Agenda [4]** laporan BURT mengenai hasil Penyempurnaan Rancangan Peraturan DPR-RI tentang Peliputan Pers dilanjutkan pengambilan keputusan. Pimpinan BURT melaporkan kembali mengenai Rancangan Peraturan DPR-RI tentang Peliputan Pers di DPR-RI dengan harapan ditetapkan menjadi Peraturan DPR-RI. Pimpinan BURT mengatakan bahwa penyempurnaan rancangan ini telah melibatkan seluruh fraksi yang memberikan saran dan pandangannya. Bahwa laporan ini juga telah dilakukan pendalaman dengan melibatkan Asosiasi Profesi Wartawan, Dewan Pers, KPI, PWI, SPS, PRSSNI, ATVSI, AJI, IJTI, dan Koordinatoriat Wartawan DPR melalui beberapa kali rapat dan *workshop*, serta memutuskan bahwa peliputan pers di DPR perlu diatur dalam peraturan Tata Tertib.

Atas laporan Pimpinan BURT ini, Rapat Paripurna memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan DPR-RI tentang Peliputan Pers di DPR-RI menjadi Peraturan DPR-RI.

### Kegiatan Bidang Pengawasan

Rapat Dengar Pendapat Komisi V pada pertengahan Maret dengan Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perkeretaapian, Dirut PT Kereta Api Indonesia dan Dirut PT Pelayaran Nasional Indonesia, menyimpulkan antara lain, bahwa Komisi V DPR menyetujui alokasi anggaran *public service obligation* (PSO) tahun anggaran 2013 yang diusulkan oleh Ditjen Perhubungan laut dan Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan untuk subsidi di bidang perhubungan laut dan perkeretaapian dengan rincian: [1] PSO PT. Pelni sebesar Rp. 726,523 miliar dan [2] PSO PT. KAI sebesar Rp. 704,784 miliar. Komisi V mendukung direalisasikannya subsidi angkutan sepeda motor dengan gerbong kereta api dan

angkutan laut dalam rangka mengurangi tingkat kecelakaan di jalan raya pada saat penyelenggaraan angkutan Lebaran dan Natal 2013 serta tahun baru 2014. Komisi V meminta Ditjen Perhubungan Laut dan V Perkeretaapian untuk meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan alokasi anggaran PSO dengan skema yang komprehensif agar pemanfaatannya tepat sasaran. Komisi V memahami penjelasan Ditjen Perhubungan Laut dan Ditjen Perkeretaapian perihal peningkatan pembangunan infrastruktur strategis bidang perhubungan laut dan bidang perkeretaapian dalam rangka mewujudkan pelayanan masyarakat yang efektif, efisien, merata dan berkelanjutan. Komisi V mendukung PT. KAI dalam melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas layanan dengan tetap mempertimbangkan dayabeli masyarakat, antara lain dengan [1] upaya penggantian secara gradual Kereta Api Ekonomi Non-AC Jabodetabek dan Kereta Api Ekonomi Jarak Jauh menjadi Kereta Ekonomi AC, [2] upaya pengalihan PSO Kereta Ekonomi Jabodetabek ke kereta ekonomi keperintisan di daerah.

### Pelantikan PAW

Selasa, 2 April 2013, Ketua DPR, sesuai dengan keputusan Presiden-RI, melantik tiga Anggota DPR Pengganti Antar Waktu dari Partai Golongan Karya, yaitu Sdr. Sunaryo Adhiwardoyo, SH. MH., dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII, menggantikan Sdr. Drs. Enggartiasto Lukita; Sdr. TB. H. Ace Hasan Syadzily MSi., dari Daerah Pemilihan Banten I, menggantikan Sdr. H. Mamat Rahayu Abdullah; dan Sdr. M. Basri Sidehabi, SIP. MBA., dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II, menggantikan Sdr. H.M. Malkan Amin.

Dalam sambutannya, disampaikan bahwa di *bidang politik*, memang ada peningkatan suhu politik di tahun 2013 berkaitan dengan makin dekatnya penyelenggaraan Pemilu 2014. Diharapkan, dinamika politik yang berkembang harus tetap dalam koridor demokrasi, dan tidak merusak sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam hal *penegakan hukum* dan pelaksanaan HAM, baru-baru ini kita dikejutkan dengan peristiwa penyerbuan LAPAS Kelas 2B Cebongan, Jogjakarta. Peristiwa penembakan ini harus diungkap dengan tuntas, pelakunya harus dihukum berat siapapun mereka. Tim Pencari Fakta harus segera bekerja, dan keadilan harus benar-benar ditegakkan. Negara tidak boleh dikuasai oleh hukum rimba, dimana kaidah hukum formal tidak lagi menjadi pegangan dan masyarakat menggunakan perilaku hukumnya sendiri. Kalau masyarakat hanya mempercayai perilaku hukumnya sendiri, maka yang paling kuatlah yang akan merasa paling benar. Peristiwa ini jangan sampai terulang kembali di negara Indonesia, sebagai negara hukum yang berjalan atas dasar konstitusi UUD NRI Tahun 1945.

### Diplomasi Parlemen

Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah turut berpartisipasi dalam kegiatan "*The Asia-Pacific Regional Parliamentarian and CSO Forum on MDG Acceleration and the Post 2015 Development Agenda*", yang diselenggarakan di Nusa Dua Bali, pada tanggal 25-26 Maret 2013. Dalam pertemuan dua hari tersebut, telah dibahas berbagai isu, di antaranya: mengambil pelajaran dari implementasi MDGs, baik dari pengalaman MDGs di kawasan Asia-Pa-



sifik maupun pengalaman MDGs dari kawasan Afrika, serta membahas berbagai tema-tema pilihan lainnya, seperti: “*Incorporating Gender Equality in the Post 2015 Development Framework*”, “*Universal Access to Health*”, “*Children and Youth*”, “*Water and Sanitation for All*”, “*Governance and Human Rights*”, “*Discrimination and Stigmatization*”, dan lain-lain. Terhadap isu kerjasama pembangunan, pertemuan ini, memandang perlunya berbagai pihak yang terlibat untuk

membangun kerjasama, namun format kerjasama tersebut perlu disusun dalam skema kerjasama yang lebih tepat, tidak seperti sebelumnya di mana bentuk hubungan adalah hanya dalam hubungan antara donor dan penerima. Skema kerjasama tersebut dapat berupa: *triangular cooperation*, *south-south cooperation*, *philanthropy*, *private-public partnership*, dan peran NGOs (*community development*).\*\*

## Rencana Induk Global Pasca 2015 Harus Dibuat Komprehensif



Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung Wibowo selaku Ketua Delegasi DPR saat memimpin pertemuan dengan Delegasi Parlemen Maroko Karim Ghellab di Convention Center, Level 2, Cumbaya-Ecuador.

Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Pramono Anung Wibowo dalam Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-128 di Quito-Ecuador menegaskan, kini merupakan saat yang tepat bagi Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk menangani dan berkontribusi memberikan solusi-solusi baru bagi permasalahan global.

Dalam konteks ini Pramono menghargai upaya-upaya yang dilakukan oleh IPU dalam memajukan musyawarah global untuk agenda-agenda pembangunan pasca tahun 2015. Dalam beberapa hari ke depan DPR RI bekerjasama dengan IPU akan melaksanakan satu konsultasi regional mengenai tujuan-tujuan pembangunan melenium dan agenda pembangunan pasca tahun 2015 di Bali. Acara ini akan dilaksanakan bersamaan dengan pertemuan konsultatif ke-4 dari *high level panel*.

Menurut dia, mengingat Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah ditun-

duk sebagai Ketua Bersama dari Panel-panel untuk agenda-agenda pembangunan pasca 2015 ini Indonesia menawarkan suatu jalan menuju pembangunan berkelanjutan dengan kesetaraan. Karena berkelanjutan hanya dapat dicapai bila terdapat kesetaraan, tidak hanya untuk mengintensifkan pertumbuhan ekonomi saja tapi juga untuk menyeimbangkan pembangunan di dalam semua aspek dan juga membantu untuk melestarikan kehidupan pembangunan itu sendiri.

Indonesia berpendapat bahwa suatu rencana induk global untuk agenda-agenda pem-

bangunan pasca 2015 harus dibuat secara komprehensif, dan agenda-agenda pembangunan ini harus dicapai melalui suatu proses *bottom up* atau proses dari bawah ke atas. Oleh karenanya suatu konsultasi global perlu untuk melibatkan lebih banyak lagi para pemangku kepentingan global. Seperti, masyarakat sipil, media massa, warga negara dan parlemen. Ini merupakan satu nilai yang ingin ditawarkan oleh Indonesia.

Terkait dengan kerja-kerja tiga komite tetap Pimpinan DPR RI ini menyatakan, ingin mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan rasa penghargaan yang tulus atas kerja yang sangat bagus yang telah dilakukan oleh kuara pertur dan juga sekretariat dalam mempersiapkan draft akhir. Dalam konteks ini Indonesia ingin menekankan bahwa tanggung jawab untuk melindungi harus dilakukan secara komprehensif untuk melindungi masyarakat sipil cara-cara damai harus selalu menjadi prioritas utama, dan intervensi militer harus selalu menjadi pilihan terakhir dalam skema untuk mencapai perdamaian.

Sementara penggunaan media sangat penting untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dan demokrasi, tetapi agar supaya bisa mendapatkan berita yang adil dan berimbang kami berpendapat bahwa pelaksanaan hak un-

tuk kebebasan berpendapat oleh pers dan media bukanlah sesuatu yang mutlak. Harus selalu ada keseimbangan antara hak dan tanggung jawab.

“Untuk tujuan ini kami ingin mendesak asosiasi pers secara global mengembangkan cara-cara guna memastikan pelaksanaan dan penegakan kode etik dan standar jurnalisisme,” ungkap Pramono.

Sebelumnya Pramono mengucapkan selamat kepada parlemen Ekuador atas penyelenggaraan Sidang Umum IPU yang ke-128 yang luar biasa ini, dan mengucapkan rasa terima kasih saya yang tulus atas keramah-tamahan tulus yang telah diberikan kepada delegasi Indonesia selama kunjungan di Quito ibukota dari Ekuador dan juga kota bersejarah yang dianggap sebagai salah satu dari daftar warisan budaya dunia Unesco yang pertama.

Dia juga ingin mengucapkan selamat kepada yang mulia Fernando Cordero Quepa- Ketua Majelis Nasional Ekuador atas terpilihnya sebagai Presiden Majelis yang terhormat ini. “Saya percaya bahwa di bawah ada pedoman dan panduan dan kepemimpinan beliau yang bijaksana maka pembahasan kita akan menghasilkan hal-hal yang bermanfaat bagi kedamaian dan juga kesejahteraan umat manusia,” demikian Pramono. (iw)/foto:iwan armanias/parle.

## Komisi VI dan Mendag Bahas Anggota BPKN



Suasana Raker Komisi VI DPR dengan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan membahas keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

Rapat Kerja (Raker) Komisi VI DPR RI dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Rabu (3/4) membahas keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Raker dipimpin Ketua Komisi VI Airlangga Hartarto (F-PG), didampingi Wakil Ketua Komisi VI Erik Strya Wardhana (F-Hanura), dan Benny K Harman (F-PD).

DPR RI, jelas Airlangga, telah menerima surat dari Presiden RI tertanggal 20 Februari 2013 yang berisi penyampaian nama-nama calon anggota BPKN. Surat

tersebut kemudian dibawa ke Badan Musyawarah (BAMUS) DPR tanggal 28 Februari 2013 dan menugaskan pembahasannya ke Komisi VI DPR RI.

Berdasarkan Pasal 35 UU No.8/1999 tentang Perlindungan Kosumen, pengurus BPKN terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, serta sekurang-kurangnya 12 orang dan sebanyak-banyaknya 25 orang anggota yang mewakili semua unsur. Anggota BPKN diangkat dan diberhentikan oleh

presiden atas usul menteri setelah dikonsultasikan kepada DPR RI.

Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota BPKN, menurut UU tersebut adalah selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan lagi. Sementara Ketua dan Wakil Ketua BPKN dipilih oleh para anggotanya.

“Hari ini akan membahas nama-nama BPKN periode 2013-2016 sebagai mana tercantum dalam surat Presiden yang



merupakan usulan dari Menteri Perdagangan dengan 23 nama calon anggota BPKN,” ungkap Airlangga saat membuka rapat. Nama-nama tersebut meliputi unsur pemerintah 4 orang, pelaku usaha 3 orang, lembaga perlindungan konsumen dan LSM 4 orang, akademisi 7 orang, dan tenaga ahli 5 orang.

Prosedurnya, Komisi VI sendiri akan melakukan pendalaman terhadap nama-nama tersebut. Bila tidak ada per-

soalan, maka komisi VI akan memberikan pendapatnya untuk menerima nama-nama dimaksud. Setelah disetujui DPR, presiden segera mengangkat para anggota BPKN tersebut.

Raker Komisi VI sendiri dengan Menteri Perdagangan membahas tiga agenda besar, yaitu membahas calon anggota BPKN, membahas permasalahan kenaikan komoditas, dan membahas perjanjian luar negeri. (mh), foto : od/parle/hr.

## BEM UNDIP Pertanyakan Kasus LP Cebongan



Anggota Komisi III DPR Nudirman Munir Audiensi dengan BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip).

Dalam acara Audiensi DPRRI dengan BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip), Anggota Komisi III DPR Nudirman Munir juga mempersilahkan para mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan baik yang berkaitan dengan hukum yang merupakan bidang Komisi yang dinaunginya, juga pertanyaan lain seputar kinerja dewan.

Aisyah Tussadiah menjadi penanya pertama yang mengajukan pertanyaan seputar kasus hukum yang terjadi di LP Cebongan, Yogyakarta beberapa waktu lalu.

“Bagaimana bapak bersikap mengenai kasus yang terjadi di LP Cebongan beberapa waktu lalu,” tanya Aisyah. Selain itu, mahasiswa semester VI Fakultas Hukum Undip ini juga menanyakan tentang pertimbangan anggota dewan melakukan kunjungan ke negara lain yang konon katanya berkaitan dengan Pasal Santet yang ada dalam RUU yang sedang dibahas di DPR RI.

Menjawab pertanyaan tersebut, Nudirman mengatakan ia dan Anggota Komisi III lainnya cepat tanggap terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi belakangan ini. Beberapa waktu lalu ia langsung mengunjungi Palopo, Sulawesi Selatan guna mengetahui peristiwa yang sebenarnya terjadi. Dan Rabu (3/4) malam ini ia akan langsung ke Yogya-



karta guna melakukan sidak ke LP Cebongan.

“Kami sangat serius terhadap kasus ini, di sini benar-benar terjadi pelanggaran HAM. Dalam kasus LP Cebongan ini saya menilai Provost TNI harus dilibatkan, karena TNI juga memiliki oditur militer yang bisa membantu menyelidiki kasus ini. Dan tidak mungkin hanya Polisi yang menyelidiki kasus ini,” jelas Nudirman.

Khusus untuk pertanyaan mengenai alasan kunjungan anggota dewan melakukan kunjungan ke negara lain, Nudirman mengatakan bahwa hal tersebut merupakan “permainan” media massa semata. Karena sebenarnya anggota dewan melakukan studi banding ke negara lain itu bukan khusus untuk Pasal Santet. Melainkan untuk melihat dan membandingkan hukum yang ada di negara lain dengan yang ada di negara kita.

“Kami ingin mengetahui bagaimana hukum di negara lain, di negara komunis, negara di Eropa atau di negara Islam, apakah ada perbedaannya dan bagaimana jika dibandingkan dengan kearifan lokal yang ada di negara kita. Dan bagaimana juga negara lain tersebut mengatur tentang para penegak hukumnya,” jawab Nudirman. (ayu), foto : hindra/parle/hr.

# Timwas DPR Desak Aset-aset yang Disita Segera Dieksekusi



Tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Kasus Century.

Tim Pengawas (Timwas) Kasus Bank Century DPR mendorong Kepolisian dan Kejaksaan untuk melakukan penyitaan dan eksekusi terhadap aset-aset yang telah disita terkait kasus Bank Century yang telah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya aset-aset tersebut bisa digunakan sebagai pengganti dana nasabah PT Antaboga Delta Sekuritas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian salah satu kesimpulan rapat Timwas Century DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dengan Tim Penyidik Polri dan Tim Jaksa Penuntut Umum, Rabu (3/4) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Dalam acara ini sejumlah anggota Timwas mempertanyakan kepada kejaksaan mengapa aset-aset yang telah dalam daftar penyitaan tidak segera dieksekusi misalnya Mall Serpong BSD

Tangerang sehingga ada gugatan baru dan ada pemilik lain. “Kalau tidak ada langkah-langkah cepat kejaksaan sebagai tim penyelamatan aset Century akan hilang. Kita tak usah mimpi memburu aset-aset di luar negeri, fokus saja pada aset dalam negeri,” tegas Bambang Soesatyo dan Chandra anggota Timwas DPR.

Dari laporan penyidik kepolisian terungkap ada beberapa miliar yang disita, juga aset di Kelapa Gading, juga beberapa kapling di Pondok Kopi diharapkan Timwas DPR segera diakuisisi kemudian segera diuangkan dan mengganti dana nasabah.

Selain itu Tim Pengawas Century dalam kesimpulannya mendorong Tim Penyidik Mabes Polri dan Tim Jaksa Penuntut Umum melakukan pemeriksaan secara mendalam untuk mengetahui motif PT Ancora Land mengakuisisi PT GNU. Pasalnya, dari hasil penyidikan diketahui bahwa PT GNU adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang properti namun tidak memiliki karyawan, tidak memiliki aset usaha dan tidak ada kegiatan operasional perusahaan.

Timwas DPR mempertanyakan, mengapa PT GNU yang tidak memiliki apa-apa ini kemudian menarik perhatian Ancora tetap mengakuisisi. Dalam kaitan ini bisa diterapkan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan sudah bisa ditarik PT Ancora dengan

motif pengambilan aset 22 ha dengan modus pengalihan hak.

Anggota Timwas Nudirman Munir mengharapkan penyidik polri dan jaksa penuntut untuk melakukan penyidikan secara serius terhadap kasus ini. Ia menolak jika dikatakan tidak ada hubungan penjelasan polri dan



Anggota Timwas Century Nudirman Munir dan Bambang Soesatyo.

kejaksaan. Jelas ada hubungan antara PT Graha Nusa Utama (GNU) dengan Ancora, lalu siapa yang mengeluarkan dua *diligent*. Kalau disebut tidak ada masalah, tidak benar sebab ini sudah diakuisisi tahun 2010. “Kalau terbukti ada, perusahaan ini juga harus diperiksa, karena ada main. Ini tugas Timwas, mengawasi ini. Kalau dikatakan penjelasan penyidik polri dan jaksa penuntut tidak hubungannya dengan Timwas, salah besar,” kata Nudirman lagi. (mp,vg), foto : hindra/parle/hr.

## Pimpinan DPR Rencanakan Rapat Konsultasi dengan Presiden Pekan Depan

Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung mengatakan, Pimpinan DPR berencana menggelar rapat konsultasi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pekan depan. Rapat konsultasi akan membahas sejumlah persoalan nasional yang terjadi akhir-akhir ini dan telah mendapat perhatian masyarakat luas.

Persoalan yang akan dibahas adalah kasus penembakan terhadap empat tahanan titipan di LP Cebongan Sleman, Yogyakarta. Termasuk pengambilalihan RUU Peradilan Militer yang di “gantungkan” oleh pemerintah.

“Rencananya sekitar hari Selasa atau Rabu pekan depan, kita perlu agendakan rapat konsultasi dengan Presiden. Salah satu agendanya membahas kasus LP Cebongan tersebut,” ujar Wakil Ketua DPR Pramono Anung usai menerima Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penuntasan Kasus Cebongan di Gedung Nusantara III, Rabu (3/4).

Berdasarkan aspirasi publik, Pramono setuju dan mendukung DPR untuk mendorong pemerintah segera membentuk tim investigasi independen untuk mengusut dan mengungkap kasus di LP Cebongan. Hal ini penting untuk memastikan dan benar-benar mengungkap siapa pihak





yang paling bertanggungjawab dalam kasus ini. Sebab, banyak pihak yang mengkhawatirkan ketidakobjektifan hasil penyidikan kasus tersebut oleh tim penyidik yang sudah bekerja saat ini.

Terkait dengan RUU Peradilan Militer yang sejak 2009 lalu terkandung-katung dan tidak jelas ujung penyelesaiannya, Pramono berniat untuk mengambil alih RUU itu sebagai inisiatif DPR. Dengan demikian RUU itu dapat segera dibahas dan diselesaikan.

“Sebenarnya RUU Peradilan Militer itu adalah inisiatif dari pemerintah pada 2009 lalu. Namun sampai saat ini terkandung-katung pembahasan dan penyelesaiannya. Karena itu, kalau memang tidak jelas, DPR bersedia mengambil alih, dan RUU itu menjadi inisiatif DPR agar dapat segera dibahas dan diselesaikan,” jelas politisi dari F-PDI Perjuangan ini. (sf), foto : od/parle/hr.

Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung.

## Koalisi Masyarakat Sipil Datangi DPR



Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung didampingi Pimpinan Komisi III dan Anggota Komisi I menerima Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Penuntasan Kasus Cebongan.

Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung berjanji akan segera meneruskan usulan dari Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Penuntasan Kasus Cebongan terkait kasus penyerangan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cebongan, Yogyakarta kepada Komisi I dan III. Ia juga akan membawa hasil audiensi ini pada rapat konsultasi formal Pimpinan DPR dengan Presiden.

“Saya mendukung 1000 persen apa yang disampaikan teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil. Secepatnya akan kami bawa dan merupakan prioritas dalam rapat konsultasi formal Pimpinan DPR dan Presiden. Ini harus segera ada jalan keluarnya. Negara harus tampil. Kita juga akan teruskan langsung ke Komisi I dan III,” kata Pramono ketika menerima audiensi Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Penuntasan Kasus Cebongan di Gedung Nusantara III, Rabu (3/4). Pramono didampingi Wakil Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin, anggota Komisi III Eva Kusuma Sundari, serta anggota Komisi I Helmy Fauzy.

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Penuntasan Kasus Cebongan menyampaikan keprihatinannya atas kasus penyerangan di LP Cebongan. Koalisi Masyarakat Sipil yang hadir terdiri dari IPW, Imparsial, Elsam, Setara, dan KontraS.

“Kasus tersebut adalah kasus luar biasa, karena pelaku-

nya secara sewenang-wenang telah menyerang LP milik negara, membunuh empat tahanan yang diduga terlibat pembunuhan terhadap Serka Santoso dari Kopassus grup II Kandang Menjangan, melukai dan menciptakan trauma bagi petugas penjaga LP dan para tahanan lain. Ironisnya, hingga 11 hari kasus penyerangan tersebut dilakukan masih belum ada titik terang pengungkapan kasusnya,” ujar Ketua Setara Institute Hendardi.

Dalam penjelasannya, koalisi mendesak Pimpinan DPR RI memerintahkan Komisi I dan III agar segera memanggil para pimpinan dari institusi-institusi terkait dengan kasus tersebut, seperti Panglima TNI, Kapolri, Kemenkumham. Diharapkan para pimpinan ini dapat menjelaskan sudah sampai di mana upaya pengungkapan kasus tersebut.

Selain itu, tambah Hendardi, koalisi juga menyarankan Pimpinan DPR agar meminta Komisi I dan III untuk segera menjangkau pendapat publik melalui RDPU, dengan mengundang kelompok masyarakat sipil untuk memberi masukan. Sebagai fungsi pengawasan dari DPR RI, koalisi berharap pimpinan DPR dapat berkomunikasi dengan Presiden untuk membentuk tim penyidik independen dalam menyelesaikan kasus tersebut. Ini mengingat sangat mendesaknya dilakukan penyelidikan oleh tim independen agar tidak bias dalam penanganan kasus.

“Dengan demikian maka kredibilitas hasil investigasi akan tinggi, karena dilakukan oleh pihak-pihak yang independen,” tandas Hendardi.

Terkait dengan UU Peradilan Militer, koalisi mendesak pimpinan DPR agar meminta Komisi I untuk segera melanjutkan pembahasan revisi UU Peradilan Militer yang sudah terkandung-katung sejak 2009 lalu, agar aparat militer yang melakukan tindak pidana umum diproses hukum di pengadilan umum.

“Ini untuk memotong rantai imunitas yang selama ini membelenggu peradilan militer,” ujar Hendardi. (sf), foto : od/parle/hr.



# DPR RI Harapkan Siprus Atasi Konflik Secara Damai



Ketua DPR Marzuki Alie saat menerima Dubes Siprus Nicos Panayi.

DPR mengharapkan Pemerintah Siprus dapat mengatasi konflik di negaranya secara damai dan sesuai dengan hukum Internasional.

“Kita menghargai penyelesaian konflik sesuai hukum dan kami harapkan dapat diselesaikan dengan baik antara kelompok yang bertikai,” Ujar Ketua DPR Marzuki Alie saat menerima Dubes Siprus Nicos Panayi, di Gedung Nusantara III DPR RI, Rabu (3/4).

Saat ini, lanjutnya, hubungan Indonesia dan Siprus semakin berkembang diberbagai bidang. “Mengenai undangan ke Siprus kita akan mempertimbangkan dan menyesuaikan jadwalnya

ke sana,” paparnya.

Pada kesempatan itu, Marzuki mengapresiasi peran Kedutaan Besar Siprus yang tidak pernah kenal lelah terus meningkatkan kerjasama antara Siprus dan Indonesia. “Kami menghargai usaha kedutaan besar Siprus untuk meningkatkan hubungan kedua negara dalam berbagai sektor khususnya ekonomi,” tambahnya.

Saat bertemu dengan Ketua DPR Marzuki Alie, Dubes Siprus Nicos Panayi dan Pimpinan Dewan saling tukar pikiran terkait sistem Politik di Indonesia, perkembangan *Asean Community* dan soal peningkatan kerjasama

ma Ekonomi kedua negara.

Saat ditanya terkait *Asean Community* 2015 nanti, Marzuki mengatakan, Pemerintah bersama dengan Parlemen ingin membangun kerjasama Asean di bidang Politik, Pendidikan maupun peningkatan kesejahteraan antar kawasan.

“Meskipun masih ada perbedaan antar negara prinsipnya ingin membangun bersama antar satu kawasan. Kami juga berharap Asean bebas dari konflik demi mencapai kepentingan bersama,” tambahnya. (si)/foto:iwan armanias/parle.

## Kekerasan Pada Anak Pelanggaran HAM

Anggota Komisi VIII DPR RI, Soemintarsih Muntoro menilai maraknya kekerasan yang terjadi pada anak-anak belakangan ini sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

“Kekerasan pada anak merupakan suatu pelanggaran HAM. Ketika berbicara pelanggaran HAM, berarti hak pribadi kita dibatasi oleh hak asasi orang lain,” kata Soemintarsih Muntoro.

Soemintarsih menyatakan, bahwa seorang anak yang belum memiliki kekuatan atau ketahanan diri harus dilindungi oleh para orangtuanya. Sesungguhnya yang harus diutamakan adalah bagaimanaantisipasi kita terhadap tindakan preventif yang terdapat didalam keluarga itu sendiri.

Menurutnya, keluarga sebagai unit terkecil di dalam masyarakat dan anak itu ada didalamnya. Anak sebagai re-

generasi bangsa, maka konsentrasi kita seluruh pemangku kepentingan di negeri ini baik itu elite pengambil keputusan, baik itu juga masyarakat yang berada di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus tanggap terhadap tujuan cita-cita utama dari anak itu.

Ketika anak teraniaya dalam kekerasan, berarti ada eskalasi daripada perilaku yang tidak beretika. “Yang

menjadi pertanyaan adalah, kenapa perilaku tidak beretika itu semakin marak dan semakin meningkat, artinya ada yang salah urus dalam negeri ini,” tegas Anggota Komisi VIII DPR RI.

Artinya bahwa penegakan etika moral bangsa ini terutama ketauladanan dari para pemimpinnya itu mengalami degradasi. Ketika kita sama-sama memiliki persepsi bahwa terjadi degradasi moral, intinya bersumber daripada ketauladanan pemimpin negeri ini. “Jadi kita mulai introspeksi, bahwa pemimpin itu bisa berangkat dari diri kita sendiri sebagai pemimpin,” imbuhnya.

Sebagai pemimpin itu, kata Soemintarsih, harus memiliki dasar-dasar bisa mentauladani di depan, bisa



Anggota Komisi VIII DPR Soemintarsih Muntoro.

memberikan tauladan di tengah, bisa membangkitkan semangat dan memberikan dorongan dari belakang atau

Tut Wuri Handayani.

Soemintarsih menjelaskan, bahwa sebetulnya ketiga sikap dasar tersebut merupakan penuntun dalam kehidupan yang diawali dari sumber keluarga. Dimana sebagai anggota keluarga dan sebagai individu-individu insan Indonesia paham menghayati dan mengamalkan apa sesungguhnya yang digariskan oleh pendiri republik ini. Maka pola sikap, pola tingkah laku dan pola tindak sebagai dari pengamalan lima sila.

“Melihat pada yang terjadi belakangan ini, menurut saya telah terjadi penggerusan dan mengalami kemerosotan dari nilai-nilai yang digariskan pendiri republik ini,” jelas politisi dari Partai Hati Nurani Rakyat. (sc), foto : wy/parle/hr.

## Pengesahan Bendera Aceh Melanggar Peraturan



Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Aceh, Jumat (22/3) lalu mengesahkan Qanun (Peraturan Daerah/Perda) tentang Bendera Aceh. Belakangan bendera Aceh yang sangat mirip dengan bendera organisasi separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menuai protes di kalangan masyarakat. Hal tersebut juga membuat Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunanjar Sudarsa angkat bicara.

Sesaat se usai Rapat Panja Pemilihan Kepada Daerah, Agun mengungkapkan bahwa Qanun tersebut melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah. Terutama pasal 6 ayat 4 yang menyatakan

bahwa desain logo dan bendera daerah tidak boleh mempunyai persamaan dengan desain logo bendera organisasi terlarang atau gerakan separatis.

“Ada peristiwa sejarah masa lalu perselisihan antara pemerintah pusat dengan gerakan separatis GAM yang kemudian berakhir disebut pertemuan internasional dimana GAM kembali bergabung dengan Indonesia dalam keadaan damai. Dari sana seharusnya bendera di luar Merah Putih sudah tidak boleh ada lagi. Jika hal itu terjadi bukan tidak mungkin akan timbul anggapan atau penilaian dalam masyarakat di luar Aceh yang menyatakan bahwa Indonesia sudah terkalahkan dengan GAM tadi. Jika ini terjadi maka hal ini sudah menjatuhkan wibawa bangsa di mata internasional,” papar Agun.

Meski demikian Agun menilai, belum saatnya Komisi II DPR RI memanggil Menteri Dalam Negeri untuk menjelaskan dan mendorong penyelesaian masalah ini. Agun meyakini bahwa Menteri Dalam Negeri sudah mengetahui langkah apa yang harus diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Disamping itu, praktisi Partai Golkar ini juga meminta para tokoh yang pernah ikut dalam pertemuan internasional atau penyelesaian konflik dengan GAM tersebut juga harus ikut andil kembali menyelesaikan permasalahan ini.

“Nah, jika ditanyakan apakah pengesahan bendera Aceh yang mirip bendera GAM itu menjadi pengingkaran atas perundingan internasional sebelumnya, untuk itu Pak JK (Jusuf Kalla-red) dan Pak Hamid Awaludin yang lebih mengerti. Untuk itu saya mohon dengan sangat agar Pak JK dan Pak Hamid untuk tidak berpangku tangan mendengar permasalahan ini,” pinta Agun sesaat setelah Rapat Panja. (Ayu), foto : wy/parle/hr.



# DPR Minta Pemerintah Capai Target Swasembada 5 Komoditas Pangan

DPR RI mengharapkan Pemerintah mencapai target swasembada 5 komoditas pangan utama yaitu padi, Jagung, kedelai, gula dan daging, sesuai dengan yang direncanakan. Komisi IV meminta penjelasan Kementerian Pertanian mengenai progres program swasembada dan swasembada berkelanjutan 5 komoditas utama pertanian.

“Intinya bisakah akhir Tahun 2014 mencapai swasembada dari 5 komoditas pangan tersebut, dan kalau tidak bisa apa kendalanya, serta tidak boleh terjadi fluktuasi harga di pasar,” kata Ketua Komisi IV Romahurmuzy, saat memimpin Raker dengan Menteri Pertanian Suswono dan Kementerian Keuangan. Di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (3/4).

Komisi IV meminta Menteri Pertanian untuk memberikan penjelasan progres penyerapan anggaran untuk persiapan kegiatan Kementerian Pertanian 2013, persiapan panyaluran pupuk dan benih, serta *progres roadmap* swasembada 5 komoditas pangan utama.

Berdasarkan Permentan, Pemerintah menargetkan produksi tahun 2012, padi sebanyak 67,82 juta ton dan mencapai 76,57 juta ton dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 3,64%.

Kemudian, untuk target produksi komoditas jagung sebanyak 18,86 juta ton dan pada tahun 2014 produksi mencapai 20,82 juta ton dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 3,33%.

Target produksi komoditi kedelai tahun 2012 sebanyak 1,10 juta ton pada tahun 2014 produksi mencapai 2,70 juta ton dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 35,02%.

Sementara itu, target produksi gula tahun 2012 sebesar 2,66 juta ton dan pada tahun 2014 produksi mencapai 3,10 juta ton dengan pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 4,53%.

Serta untuk target produksi daging sapi tahun 2012 sebanyak 0,41 juta ton dan pada tahun 2014 produksi mencapai 0,53 juta ton dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 29,57%.

Terkait Kegiatan Subsidi Pupuk Tahun 2013, menindak lanjuti Surat Menteri Keuangan No S-177/MK.02/2013 tanggal 5 Maret 2013), “Pengalihan sebagian anggaran BA.018 ke Subsidi Pupuk pada BA BUN Belanja Pengelolaan Subsidi dapat

diproses lebih sepanjang dana terintegrasi dalam pupuk yang menggunakan formulasi : (Harga Pokok Penjualan – Harga Eceran tertinggi) X Volume Penyaluran, sebagaimana diatur dalam PMK tentang Tata Cara Penyediaan anggaran Perhitungan dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk” ungkap Romahurmuzy.

Menurut Romahurmuzy, Komisi IV menilai apabila terjadi keterlambatan pengadaan benih dan pupuk, akan mempengaruhi kekurangan ketersediaan Pangan Nasional. Dampaknya bisa mengganggu keamanan pangan nasional.

Dia menjelaskan alokasi Subsidi Pupuk TA 2013 berdasarkan UU No.19 tahun 2012 tentang APBN TA 2013, direncanakan sebesar Rp.16.228,7 Milyar, terdiri dari Subsidi Pupuk TA 2013 sebesar Rp.15.830,5 Milyar, Kurang Bayar tahun 2010 sebesar Rp.84,6 Milyar, dan Subsidi Pupuk mendukung Peningkatan Produksi Kedelai Rp.314 Milyar.

Selanjutnya berdasarkan Permentan alokasi pupuk bersubsidi untuk sebanyak 9 juta 250ribu Ton. Namun pada bulan Februari 2013 hanya terealisasi 1.559.596 ton atau 16,86%.

Diharapkan alokasi pupuk sesuai musim tanam, dan segala keterlambatan serta harga di atas Harga Eceran tertinggi (HET) tidak terjadi. Oleh karena itu alokasi pupuk dan benih perlu mendapat pengawalan khusus, agar realisasi di lapangan tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan.

Selain itu, Romahurmuzy menjelaskan untuk Pemegang PSO untuk alokasi subsidi benih sebesar Rp.1.454,15 Milyar, adalah PT.Sang Hyang Seri (Persero) Rp.872,49 Milyar dan PT.Pertani (Persero) Rp.581,66 Milyar. “Dalam alokasinya ke Petani perlu mendapat perhatian khusus, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi lagi kelangkaan benih pada saat dibutuhkan pada tahun 2013 dan seterusnya,” katanya.

Berkaitan dengan hal itu, Komisi IV memandang penting untuk memiliki prognosa penyaluran benih bersubsidi, baik jadwal penyaluran untuk setiap masa tanam, serapan anggaran maupun total benih yang disalurkan, agar pelaksanaan dan penyaluran benih bersubsidi berjalan efektif.

Namun Raker ini ditunda untuk penjelasan Pemerintah, karena Kementerian Keuangan hanya diwakili setingkat eselon II. (as), foto : od/parle/hr.



Ketua Komisi IV DPR Romahurmuzy.

# KPK Berhak Melakukan Penyadapan



Wakil Ketua Baleg DPR Dimiyati Natakusumah.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Achmad Dimiyati Natakusumah mengatakan bahwa penyadapan memang melanggar HAM, kecuali jika itu dilakukan oleh KPK. Karena menurut politisi dari FPPP ini penyadapan yang dilakukan KPK merupakan salah satu cara mengungkap atau menye-

lidiki kasus korupsi yang tengah dilakukannya.

Ditemui di Gedung Nusantara II DPR sebelum mengikuti Rapat Paripurna, Selasa (2/4) Dimiyati juga anggota Komisi Hukum DPR ini menyatakan, korupsi merupakan sebuah tindak kejahatan yang merugikan negara. Dengan tidak mengurangi kapabilitas dari hakim, Dim menambahkan jika KPK terlebih dahulu harus melaporkan rencana penyadapannya maka bukan tidak mungkin rencana penyadapan tersebut bisa bocor terlebih dahulu.

Selain itu menurut Dim, hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang No.30 tahun 2002 tentang KPK, khususnya pasal 12 yang menyatakan bahwa korupsi merupakan sebuah kejahatan sistematis sehingga perlu dilakukan upaya penyadapan untuk pengungkapannya.

Meski demikian menurut Dim, dalam melakukan penyadapan KPK juga tidak boleh melakukannya sembarangan tanpa ada azas dugaan terlebih dahulu. Dengan kata lain, orang yang akan disadap merupakan orang yang memang benar-benar telah dicurigai dan telah melakukan tindak pidana korupsi.

“Jika semua orang disadap barulah itu pelanggaran HAM. Namun kalau yang disadap memang orang yang tengah dicurigai telah melakukan tindak korupsi, ya tidak masalah,” tambah Dim. (Ayu)/foto:iwan armanias/parle.

## DPR Tetapkan Agus Martowardojo Sebagai Gubernur BI

Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Pramono Anung, Selasa (2/4), menetapkan dan menyetujui Agus Martowardojo sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI), menggantikan Darmin Nasution yang akan pensiun pada Mei mendatang. Sebelumnya, Agus menjabat sebagai Menteri Keuangan, dan akan menjabat Gubernur BI untuk periode 2013-2018.

Dalam laporannya, Ketua Komisi XI Emir Moeis memaparkan hasil penghitungan suara terhadap pencalonan Agus yang dilakukan Komisi XI pada 26 Maret lalu, yaitu sebanyak 46 suara setuju, tujuh suara menolak, dan satu suara abstain.

“Dari 54 suara, secara mayoritas menyetujui Pak Agus sebagai Gubernur BI yang baru,” kata Emir di Sidang Paripurna, Gedung Nusantara II, Selasa (2/4).

Seiring penyetujuan Agus sebagai Gubernur BI, Komisi XI memberikan 14 catatan sebagai bekal untuk Agus memimpin BI. Catatan itu di antaranya, terkait fungsi dan tugas BI dalam hal pengendalian inflasi.

Komisi XI meminta BI harus fokus pada pengendalian target inflasi melalui penguatan fungsi Tim Pengendalian Inflasi (TPI) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta menjaga kestabilan nilai tukar.



Gubernur BI terpilih Agus Martowardojo didampingi Ketua DPR Marzuki Ali dan Wakil Ketua DPR Pramono Anung.



Selain itu, dalam mendorong perkembangan perbankan syariah di Indonesia, BI harus terus berupaya mendorong akselerasi pertumbuhan perbankan syariah mengingat besarnya potensi pasar perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan, terkait kebijakan makroprudensial yang dijalankan, BI harus berpihak kepada kepentingan petani, nelayan, UMKM, sektor riil, dan kepentingan ekonomi nasional.

“Dalam hal mewujudkan ketahanan pangan nasional, BI harus terus mendorong peningkatan dan memprioritaskan alokasi kredit kepada sektor pertanian rakyat serta berkoordinasi dengan OJK,” ujar Emir.

Emir menambahkan, Gubernur BI terpilih juga harus dapat menjaga kekompakan dan keharmonisan kerja di lingkungan BI agar terjalin hubungan kerja sama yang baik dan keputusan Dewan Gubernur yang bersifat kolektif dan kolegial.

“Terkait laporan telaah BAKN DPR mengenai proyek tahun jamak Hambalang, Gubernur BI terpilih sebaiknya memenuhi pernyataan untuk mengundurkan diri, bilamana ditetapkan menjadi tersangka,” jelas Emir. (sf)/foto:iwan armanias/parle.

## BK akan Undang Pimpinan Fraksi, Bahas Kehadiran Anggota

Badan Kehormatan - BK DPR RI segera menjadwalkan pertemuan dengan Pimpinan Fraksi untuk membahas masalah minimnya tingkat kehadiran anggota terutama dalam rapat paripurna. Hal ini disampaikan Ketua BK, Trimedy Panjaitan kepada wartawan sebelum mengikuti rapat paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (2/4/13).

“Kita sudah sepakat kehadiran dalam rapat paripurna ini harus sama-sama dijaga, ibaratnya ini etalase. Jadi kita perlu bicara dengan pimpinan fraksi, jangan ini jadi tanggung jawab BK saja,” ungkapnya.

Ia menambahkan upaya BK dalam memperbaiki tingkat kehadiran anggota dalam rapat paripurna sudah dilakukan misalnya dengan mem-



Ketua BK DPR Trimedy Panjaitan.

berlakukan absensi dengan mesin perekam sidik jari. Jumlah kehadiran anggota meningkat walaupun ia tidak menafikan ada yang keluar lagi setelah absen.

“Kondisi ini sebagian bisa kita maklumi karena jam kerja anggota DPR ini seperti wartawan. Dalam waktu yang sama bisa beberapa kegiatan, seperti saat ini saya sebenarnya harus hadir di sidang perdana gugatan Pemilukada Sumut di Mahkamah Konstitusi,” paparnya.

Perbaikan terus dilakukan tetapi ia meminta publik dapat memaklumi bukan tidak mungkin ada anggota pada awal rapat hadir kemudian minta izin keluar untuk menjadi pembicara seminar di kampus, atau menghadiri rapat partai karena sebagai anggota DPR ia juga menjadi pengurus DPP. BK menurutnya akan mengambil jalan tengah misalnya Fraksi PDIP yang memiliki anggota 94 orang, minimal harus hadir 60 orang. (iky)

## Komisi VII DPR Kunjungi Raja Ampat

Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan lapangan ke Raja Ampat Papua Barat dalam rangka menghimpun masukan untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Protokol Nagoya. Sembilan anggota pan-sus RUU ini meninjau salah satu area di kawasan Raja Ampat yaitu Teluk Kabui dan sempat singgah di Pulau Waiwo pada Selasa (2/4).

“Sumber daya yang kita punya ini sayang kalau tidak dijaga. Lebih dari 75 persen spesies di dunia ini ada di Indonesia termasuk tumbuhan yang bisa jadi obat-obatan. Maka itu harus kita lindungi melalui Undang-undang ini.” ungkap Ketua Komisi VII Sutan Bhatoegana yang sekaligus menjadi

Ketua Tim.

Menurut Sutan, upaya pelestarian genetik melalui program konservasi jenis dan habitatnya sangat penting untuk melindungi kekayaan keanekaragaman hayati di Raja Ampat. Kegiatan tersebut harus diiringi dengan penelitian lebih lanjut untuk menggali potensi dan nilai keragaman hayati dan melindungi ekosistem.

Ditegaskan pula, apabila ada kegiatan penelitian yang dilakukan oleh pihak asing terhadap kekayaan keanekaragaman hayati ini (terutama penelitian di bidang genetika) harus mengikuti kaidah-kaidah yang tertera pada Protokol Nagoya. RUU Ratifikasi Protokol Nagoya ini memiliki akses



Tim Kunlap Komisi VII DPR dipimpin Sutan Bhatoejana kunjungi Raja Ampat.

pada Sumber Daya Genetik (SDG) dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang yang timbul dari pemanfaatan atas konvensi keanekaragaman hayati.

Sementara itu Deputy III Bidang Pengendalian kerusakan lingkungan dan pengendalian iklim Kementerian Lingkungan Hidup Arief Yuwono menjelaskan bahwa pemahaman Protokol Nagoya yang diadopsi untuk melakukan perlindungan terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisionalnya dari berbagai macam ancaman, termasuk berbagai macam pembajakan (*bio piracy*) yang telah banyak terjadi.

“Tercatat sudah banyak pengunjung yang berlaku sebagai wisatawan asing yang ternyata peneliti sumber daya genetik maka dengan Protokol Nagoya ini nanti akan kita atur sebaik-baiknya. Sehingga masyarakat setempat akan dapat untung, pemerintah setempat dan negara juga untung,” ungkap Arief.

Lebih lanjut dia berharap, Komisi VII dapat mempercepat ratifikasi protokol Nagoya yang sebaiknya dilengkapi dengan UU Sumber Daya Genetik. Dua instrumen peraturan perundangan yang memastikan bahwa Indonesia betul-betul menjadi warga dunia yaitu Ratifikasi Protokol Nagoya dan pengelolannya tertuang pada UU Sumber Daya Genetik. Keduanya sebaiknya dilaksanakan berkesinambungan sebab bila Protokol Nagoya telah diratifikasi, maka harus segera dilaksanakan dengan aturan yang jelas. (ray) foto: ry/parle.

## DPR Tidak Bisa Intervensi KPU Soal Kuota Perempuan



Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo.

Syarat keterwakilan perempuan dalam penyusunan daftar caleg sementara sebesar 30% masih menyisakan pro dan kontra. Kekecewaan sebagian kalangan terutama perempuan terhadap KPU yang tidak bisa bertindak

kepada parpol yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan, memang dapat dimengerti. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo pun menyatakan Komisi II tidak bisa mengintervensi KPU atas sikapnya itu.

Sejauh ini, Komisi II hanya bisa mengingatkan. Sebelumnya, ungkap Arif, pernah ada rapat konsultasi dengan KPU untuk membangun kesepahaman soal ini. KPU pernah diminta agar tidak membuat tafsir sendiri. “Bahwa kemudian KPU pada akhirnya tetap dengan tafsirnya sendiri, itu adalah hak dan kewenangan KPU. Itulah yang selalu saya katakan DPR tidak pernah bisa mengintervensi KPU,” jelas Arif sebelum Rapat Paripurna DPR Selasa (2/4).

Sejauh ini rekomendasi DPR juga tidak wajib dijalankan, karena tidak ada aturannya. Soal keterwakilan perempuan 30% ini, lanjut Arif, semua

parpol dipastikan mampu menyusun kuota keterwakilan tersebut. Hanya masalahnya pada kualitas perempuan itu sendiri. Partai juga ingin merekrut caleg perempuan berkualitas. “Nah, masalahnya pada soal kompetensi, kapasitas, kapabilitas, dan kualitas. Masalahnya di situ.”

Arif berpandangan, dalam struktur patriarki yang sangat kuat, pelibatan perempuan dalam politik berjalan secara bertahap, tidak bisa cepat seperti yang diharapkan. Kondisi objektif memang menuntut perempuan yang berkualitas yang bisa direkrut. “Bukan asal perempuan. Jadi, kalau sekadar perempuan, saya kira tidak satu partai pun yang tidak mampu. Pasti mampu. Masalahnya ada pada pilihan, apakah semua dapil diisi perempuan tanpa menimbang kualitas.” (mh)/foto:iwan armanias/parle.



# Tata Tertib Peliputan Pers di DPR Disahkan

Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Pramono Anung, Selasa (2/4) akhirnya berhasil menyetujui dan mengesahkan Tata Tertib Peliputan Pers di DPR. Sebelumnya rancangan peraturan ini pernah dilaporkan dalam rapat paripurna namun mendapat interupsi dan penolakan serta diminta dilakukan penyempurnaan dan harmonisasi.

Wakil Ketua BURT DPR Indrawati Sukadis ketika melaporkan hasil penyempurnaan dan harmonisasi terhadap Rancangan Peliputan Pers tersebut menjelaskan penyempurnaan telah melibatkan seluruh Fraksi untuk dimintakan masukan, saran dan pandangannya.

Menurut politisi Partai Demokrat ini, Rancangan Peraturan DPR tentang Peliputan Pers di DPR merupakan hasil tindak lanjut dari Keputusan Rapat Paripurna tanggal 5 Februari 2013 yang telah disempurnakan.

Dalam proses penyusunan Rancangan peraturan DPR tentang Peliputan Pers tersebut, BURT bersama Setjen DPR telah melakukan pembahasan dan pendalaman dengan melibatkan Asosiasi Profesi Wartawan, Dewan

Pers, KPI, PWI, SPS, PRSSNI, AT-VSI, AJI, IJTI, dan Koordinator Wartawan DPR melalui beberapa kali rapat dan *workshop* serta memutuskan bahwa Peliputan Pers di DPR perlu diatur dalam suatu Tata tertib.

BURT kata Indrawati, telah menyampaikan Rancangan tentang Peliputan Pers di DPR pada tanggal 5 Februari 2013 dalam Rapat Paripurna lalu, dalam penyampaian laporan tersebut, mendapat interupsi para Anggota, dari Fraksi di DPR seperti PKS, PPP, Golkar, Hanura dan PDI Perjuangan. Akhirnya Rapat Paripurna memutuskan untuk memberi waktu 1 s.d 3 minggu untuk dilakukan harmonisasi dengan melibatkan perwakilan Pimpinan DPR dan seluruh Fraksi.

Dalam laporannya Indrawati mengatakan, untuk menindaklanjuti hal tersebut, BURT telah mengadakan Rapat Pleno bersama Sekretariat Jenderal dengan mengundang Anggota DPR yang melakukan interupsi untuk melakukan penyempurnaan dan harmonisasi.

Dalam penyempurnaan dan harmoni-



Wakil Ketua BURT DPR Indrawati Sukadis berjabat tangan dengan Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung.

sasi tersebut, rancangan peraturan peliputan tidak mengalami perubahan secara substansi, namun hanya penyempurnaan yang bersifat teknis.

Selanjutnya, rapat sepakat bahwa hasil penyempurnaan segera disampaikan kepada Pimpinan DPR untuk diagendakan dalam Rapat konsultasi antara Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi-Fraksi dan BURT. Selain itu, hasil penyempurnaan secara tertulis juga telah disampaikan kepada Anggota DPR yang menyampaikan interupsi dalam rapat paripurna. (Spy), foto : iwan armanias/parle/hr.

## Ketua DPR RI Lantik Tiga Anggota PAW dari FPG



Ketua DPR RI Marzuki Alie melantik tiga Anggota PAW dari F-PG.

Sesuai keputusan presiden no. 23 tahun 2013 tanggal 21 Maret 2013, Ketua DPR RI, Marzuki Alie Selasa (2/4) melantik tiga anggota DPR RI Pengganti Antar Waktu (PAW) dari

Fraksi Golongan Karya, yaitu Sunaryo Adhiwardoyo yang berasal dari Daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat 8, Ace Hasan Syadzily dari Dapil Banten I dan M Basri Sidehabi dari Dapil Sulawesi Selatan 2.

“Di akhir Masa Politik dimana masa tugas anggota dewan hanya tinggal 1,5 tahun lagi, kami mengharap anggota dewan yang baru dilantik ini masih bisa memberi kontribusi yang lebih, sehingga dapat memperkuat kedewanan dalam menjalankan tugas dan fungsi kedewanan, diantaranya adalah fungsi pengawasan dan fungsi legislasi,” ujar Marzuki dalam sambutannya sesaat setelah berlangsungnya pengambilan sumpah.

Ditambahkannya, ia menyerahkan sepenuhnya keberadaan ke tiga anggota dewan yang baru itu untuk menduduki komisinya masing-masing. Ia berharap ketiga anggota PAW tersebut di tahun pemilihan mendatang dapat ikut kembali menjadi calon legislatif. Menurut Anggota

Komisi XI, Ade Komarudin yang mewakili pimpinan Fraksi, bahwa ketiga koleganya yang baru bergabung menjadi anggota dewan itu akan duduk di Komisi II, Komisi VIII, dan Komisi IX.

“Sebenarnya background saya lebih kepada Energi dan Sumber Daya Mineral, namun fraksi menentukan saya berada di komisi IX, Insya Allah saya akan siap menjalankan amanat tersebut,” ujar Sunaryo Adhiwardhoyo.

Sementara itu Ace Hasan Syadzily mengaku bersyukur mendapat amanat dan tugas berada di Komisi VIII yang nota

bene bermitra dengan Kementerian Agama, Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Perempuan dan Anak. Hal tersebut menurutnya sesuai dengan riwayat pendidikannya.

“Meski sebelumnya saya pernah menjadi Staf Kepresidenan, namun sejak kecil saya berada di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah, sehingga Alhamdulillah saya cukup memahami permasalahan yang ada di lingkungan tersebut,” papar Ace. Sedangkan M Basri Sidehabi yang merupakan seorang purnawirawan TNI AU dipercaya untuk mendiami Komisi II DPR RI. (Ayu)

## BPK Temukan 12.947 Kasus Penyimpangan Senilai Rp 9,72 T



Ketua DPR RI Marzuki Alie menerima Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) pada semester II tahun 2012 dari Ketua BPK Hadi Purnomo.

Dalam Rapat Paripurna DPR Selasa (2/4), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan temuan ketidakpatuhan senilai Rp 9,72 triliun dalam audit pemeriksaan kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) di semester II tahun 2012.

“Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan sebanyak 12.947 kasus, atau senilai Rp 9,72 triliun,” lapor Ketua BPK Hadi Poernomo dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II DPR RI, Selasa (2/4).

Dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) pada semester II tahun 2012, temuan itu mencakup pemeriksaan terhadap 709 objek, yang terdiri dari 154 objek pemeriksaan kinerja, 450 objek PDTT, dan 105 objek pemeriksaan keuangan. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan sebanyak 3.990 kasus senilai Rp 5,83 triliun yang merupakan temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan.

Sebanyak 4.815 kasus merupakan temuan kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), temuan penyimpangan administrasi sebanyak 1.901 kasus, dan sebanyak 2.241 kasus senilai Rp 3,88 triliun merupakan temuan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

Hadi menegaskan, pihaknya meminta seluruh temuan itu mendapatkan perhatian pimpinan dan anggota DPR sebagai pemilik hak pengawasan kinerja Pemerintah.

“Temuan terus menerus terjadi berulang setiap tahun. Sehingga jika kita tidak bersama-sama mendorong penyelesaian tindak lanjutnya dan menanggulangi supaya tidak terulang, maka potensi terjadinya kerugian negara yang lebih besar dapat terjadi,” kata Hadi. (sf)/foto:iwan armanias/parle.

## DPR: RUU Pilkada Akan Batasi Dana Kampanye

Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja meyakini Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) akan mampu membatasi pengeluaran dana kampanye yang ditengarai menjadi salah satu penyebab korupsi politik.

“Pembatasan pengeluaran dana pilkada, pembatasan kampanye, dan iklan kampanye diharapkan menjadikan

pilkada ke depan akan lebih baik,” kata Hakam Naja saat menjadi pembicara pada diskusi bertema “Penghamburan Uang Negara pada Pemilu Pilkada” di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/4). Pembicara lainnya dalam diskusi itu, adalah Direktur Fasilitas Kepala Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dodi Riatmadji dan Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis.





Wakil Ketua Komisi II DPR Hakam Naja.

Hakam Naja mengatakan pembatasan pengeluaran dana kampanye tersebut, akan adil bagi semua calon kepala daerah yang akan bertarung, mengingat akan mempunyai waktu dan anggaran yang setidaknya sama dalam berkampanye, demikian pula dengan iklan yang akan ditayangkan atau dilakukan di tengah masyarakat.

“Selama ini, hanya calon yang mempunyai banyak uang yang bisa beriklan di televisi, koran, media elektronik, pemasangan baliho, spanduk, bendera dan lain-lain dalam jumlah besar. Sedangkan orang seperti saya, harus capek menemui rakyat ke pelosok-pelosok desa untuk meyakinkannya agar dipilih,” katanya.

Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga mengakui, selama ini dalam penyelenggaraan pilkada tidak ada standar anggaran. Yang terjadi, menurut Hakam, hal tersebut disesuaikan dengan APBD, pendapatan asli daerah

(PAD), dana alokasi umum (DAU) dan sebagainya, yang memang kurang bisa dipertanggungjawabkan.

Untuk itu, ke depan hal itu akan diatur sesuai indeks daerah, yang meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, dan tentu jumlah pendapatan kotor daerah (PDBD) dan lain-lain. “Dana pilkada selama ini mencapai sekitar Rp 20 triliun,” ujarnya.

Meski begitu, Hakam mengatakan, pihaknya tetap menginginkan agar seluruh pilkada dilakukan dengan cara pemilihan langsung. Hal tersebut dinilai lebih *legitimate* dan sesuai dengan sistem demokrasi yang sedang ada saat ini.

Sementara itu, pakar hukum tata negara, Margarito Kamis, menegaskan, bahwa peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan dipertanyakan jika Pilkada dilakukan tidak langsung alias melalui DPRD. “Kalau kepala daerah dipilih kembali oleh DPRD, lalu bagaimana dengan fungsi KPU, Bawaslu, dan seterusnya yang selama ini merupakan bagian dari penyelenggara pemilu? Memang tetap ada masalah dengan pemilihan langsung, tapi proses demokrasi ini harus dilanjutkan dengan terus melakukan pembenahan untuk membuat sistem dan prosedur yang lebih baik lagi,” katanya.

Margarito mengusulkan, agar penghitungan suara itu langsung dari TPS ke KPU, tak lagi melalui PPK, KPUD Kabupaten/Kota, dan KPUD Provinsi. “Dengan begitu, suara rakyat lebih bisa dipertanggungjawabkan, termasuk ketika ada sengketa yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi,” sambung Margarito.

Di tempat yang sama, Direktur Fasilitas Kepala Daerah Kemendagri, Dodi Riatmadji, mengatakan, tujuan pemerintah membahas RUU tersebut adalah agar bagaimana proses pilkada berlangsung lebih baik dan akuntabel, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara. Terutama menyangkut Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan biaya keamanan yang belum dianggarkan. “Jadi, selain penghematan uang negara, juga untuk menghilangkan mahar politik untuk partai,” ujarnya. (nt)

## Reformasi Birokrasi Setjen DPR Terus Digalakkan

Setjen DPR RI telah melakukan sosialisasi dan survey Internal Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) guna mempersiapkan implementasi Reformasi Birokrasi. Setjen DPR RI merupakan salah satu dari 23 Kementerian dan Lembaga (KL) yang disetujui dalam tahun ini harus segera melaksanakan semua proses reformasi birokrasi sesuai dengan peraturan Kementerian PAN Reformasi dan Birokrasi.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Winantuningtyastiti yang akrab dengan sapaan Win mengatakan, secara internal Setjen DPR RI sejak tahun 2003 sesuai rekomendasi TAP MPR telah melaksanakan restrukturisasi organisasi Kesekjenan.

“Sebelumnya Setjen DPR RI hanya memberikan dukungan teknis administratif namun saat ini ada tugas baru yaitu tugas keahlian, dengan memberikan dukungan yang sifatnya lebih substantif misalnya penyiapan naskah akademik, hasil-hasil penelitian, analisa-analisa dan kajian,” papar Win sebelum rapat kordinasi Sekjen DPR di gedung Sekretariat Jenderal DPR RI Sabtu (30/3).

Diungkapkan Sekjen DPR, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) diterapkan kepada seluruh pegawai di lingkungan Setjen DPR RI dengan tujuan ingin mengetahui proses perubahan berbagai kegiatan dan *mind set* pegawai dalam bekerja. “Pada prinsipnya semua kegiatan harus ada *Standard Operating Procedure* (SOP) sehingga kinerja dapat terukur untuk tiap-tiap pegawai. Dalam



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti.

proses reformasi birokrasi tidak hanya kinerja institusi yang dinilai namun kinerja para pegawai mendapat penilaian,” paparnya.

Sebelumnya Setjen DPR RI sudah melakukan survey PMPRB secara online yang merupakan aplikasi teknologi informasi (TI) berbasis Web sehingga memudahkan penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi. Dalam melakukan laporan PMPRB harus disepakati oleh seluruh pejabat dan pimpinan lembaga kemudian akan dikirim secara *online* ke Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.

“Pegawai harus melakukan rencana dan target kerja setiap tahun dan hasilnya akan ada penilaian. Cara penilaiannya juga sudah berbeda dengan sebelumnya yang kita kenal dengan BP3 sekarang sudah berubah sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sehingga sekarang PNS tidak lagi bisa bekerja santai dan seadanya karena semua sudah dapat terukur,” ujarnya. (wy/si) foto:wahyu/parle

## Penyaluran Bansos Sebagian Masih Salah Sasaran

Bantuan Sosial (Bansos) yang disalurkan pemerintah sampai saat ini sebagian masih salah sasaran, karena bantuan yang seharusnya diberikan kepada orang yang tidak mampu seperti miskin, cacat yang betul-betul tidak dapat bekerja namun masih banyak orang yang masih mampu bekerja malah mendapat bantuan sosial.

Demikian dikatakan Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR Sumaryati Aryoso, sesuai rapat dengar pendapat umum dengan para pakar ekonomi di ruang rapat BAKN lantai 3 gedung Nusantara III Pansus A Jakarta, Kamis (28/3) sore.

Ketua BAKN Sumaryati Aryoso yang memimpin rapat tersebut menambahkan, mestinya bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat itu berupa lapangan kerja bukan berupa materi atau uang. “Hendaknya orang yang masih sehat dan kuat bekerja, diberikan lapangan kerja, namun jika orang sudah tua dan sudah tidak bisa lagi bekerja sebaiknya diberikan berupa uang,” ungkapnya.

Ia mempertanyakan, seorang petani yang menikmati hasil pertaniannya kenapa mereka diberi bantuan beras, mestinya mereka diberi bantuan modal bibit atau pupuk. Berarti salah sasaran dalam pemberian bantuan sosial ke-

pada masyarakat.

Sementara kondisi petani setelah panen mereka kesulitan menjual hasil panennya Bulog pun tidak mau membeli hasil panennya maka mereka kesulitan untuk menjual hasilnya. “Mestinya hasil panen para petani tersebut dibeli oleh Bulog bukan dibeli oleh tengkulak atau saudagar,” ujarnya.

Sumaryati menegaskan, petani kita tidak mendapat perlindungan dari pemerintah secara maksimal. Kondisi ini berbeda dengan negara lain seperti di Amerika, Cina, dan Vietnam petaninya dilindungi dan diberi subsidi agar mereka dapat menjual produknya.

Semestinya para petani di Indonesia betul-betul dilindungi dan diberi subsidi seperti diberi pupuk, bibit unggul dan lahan yang cukup memadai.



Ketua BAKN DPR Sumaryati Aryoso.

Kenyataannya, sampai saat ini para petani tidak mendapatkan bantuan seperti itu, bahkan subsidi pupuk yang seharusnya diberikan kepada petani, malah diselewengkan. (Spy), foto : wy/parle/hr.





Pimpinan Komisi VIII DPR dan Menteri Agama menandatangani penetapan BPIH 2013.

## BPIH Tahun 2013 Turun Rp 140.600 Dibanding Tahun 2012

Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama RI sepakat menurunkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1434 H atau 2013 M sebesar 90 dolar AS, dari tahun lalu sebesar 3617 dolar AS menjadi 3527 Dolar AS. Dalam mata uang rupiah BPIH Tahun 2013 sebesar Rp. 33.859.200, sedangkan tahun 2012 sebesar Rp.33.999.800, dengan kata lain turun sebesar Rp 140.600. Hal tersebut terungkap dalam rapat kerja Komisi VIII dengan Menteri Agama RI, Suryadharma Ali, Senin (1/4) siang.

“Jumlah tersebut dengan asumsi satu dolar nya sama dengan Rp 9600,” jelas Menteri Agama Suryadharma Ali.

Penurunan BPIH ini juga berpengaruh pada masing-masing embarkasi di Indonesia. Dari 12 embarkasi penurunan yang cukup signifikan terjadi di embarkasi DKI Jakarta sebesar 3522 atau selisih 126 Dolar AS pada tahun 2012. Sedangkan di Surabaya sekitar 3378, selisih 119 Dolar AS dari tahun sebe-

lumnya. Sementara embarkasi dengan BPIH termurah ada pada embarkasi Aceh sebesar 3253 dolar AS, dan Makasar merupakan embarkasi dengan BPIH tertinggi yaitu sekitar 3.807 dolar AS.

Menurut Ketua Komisi VIII DPR Ida Fauziyah, penurunan itu merupakan hasil kinerja Panja BPIH Komisi VIII dengan Kemenag selama dua bulan penuh. Untuk itu ia sangat mengapresiasi hal tersebut. Dijelaskannya, penurunan itu merupakan penekanan biaya dari dua komponen yaitu penerbangan dan pemondokan rumah di Mekah.

Komponen penerbangan di tahun 2012 sebesar 4300 real, pada tahun 2013 menjadi 3150 real. Sedangkan untuk biaya pemondokan di Mekah tahun 2013 memang mengalami peningkatan sekitar dua persen yaitu sebesar 4998 real. Namun calon jemaah haji hanya wajib membayar sekitar 2994 real. Dimana sisanya sekitar 2004 real dibayar dengan menggunakan subsidi yang berasal dari dana optimalisasi yang merupakan uang setoran awal jemaah yang ada di rekening menteri agama.

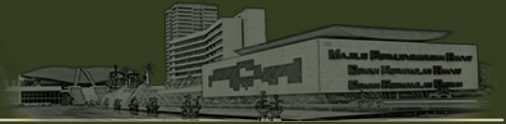
Ditambahkan Dirjen PPHU Kemenag Anggito Abimanyu, untuk komponen penerbangan, biaya Avtur memang mengalami kenaikan. Namun dengan kerja yang sangat baik dari Panja BPIH baik dari Kementerian Agama atau DPR RI, maka kenaikan avtur itu bisa disiasati dengan baik hingga akhirnya tidak sampai membebaskan calon jemaah haji.

“Penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) ini bukan berarti kualitas pelayanan ikut menurun. Malah sebaliknya, kami meminta kinerja yang baik dengan tercapainya penurunan BPIH ini dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan ibadah haji baik saat masih di tanah air, maupun saat di tanah suci mendarang,” tegas Ida. (Ayu)



Menteri Agama Suryadharma Ali didampingi Dirjen PPHU Kemenag Anggito Abimanyu.





Ketua DPR RI Marzuki Ali menerima kunjungan kehormatan Dubes Irak Untuk Indonesia Dr. Ismael Shafiq dalam rangka memperkenalkan diri sebagai Duta Besar Iraq yang baru untuk Indonesia. Kamis (04/04), foto : iwan armanias/parle/hr.



Wakil Ketua DPR/Korinbang Pramono Anung Wibowo mengangkat tangan bersama pimpinan komisi usai menetapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Daryatmo Mardiyanto menggantikan Effendy Simbolon di Gedung Nusantara I DPR RI. Kamis (04/04), foto : iwan armanias/parle/hr.



Delegasi Parlemen Indonesia yang dipimpin Pramono Anung Wibowo mengikuti Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke 128 di Convention Center, Level-2, Cumbaya-Ecuador. Minggu (24/03), foto : iwan armanias/parle/hr.



Penandatanganan Penetapan BPIH Tahun 2013 usai Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama RI dipimpin Ketua Komisi Ida Fauziah didampingi Jazuli Juawaini, Sayed Fuad Zakaria dan Gondo R. Gambiro di Gedung Nusantara II DPR RI. Senin (01/04), foto : naifuroji/parle/hr.

